

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Puranto. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja; Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Agnes Theresia, Jatongam & Arison. (2022). Pengaruh Pengendalian Intern dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris di RSUD Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai). *Jurnal Manajemen. Universitas Methodist Indonesia*. Vol. 8 No. 2. ISSN: 2301-6556.
- Abdul, Halim. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaann Keuangan Daerah Edisi kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- American Accounting Association. (2005). *Report of The Committe on Basic Auditing Concepts. The Accounting Review. Volume 47*. Hal: 15-79.
- Anggraini, Yunita, Hendra Purnata. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD secara Komprehensif*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Arfan Ikhsan. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Bastian. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFPE.
- Cohen, et al. (2007). *Metode Penelitian dalam Pendidikan*. New York. Routledge.
- Dadang Sadeli. (2008). Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 10, hal 101-111.
- Dedi Nordiawan. (2009). *Akuntansi Pemerintah Edisi kesatu*. Jakarta: Salemba.
- Dewi Selviani. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. *Journal Logistic and Accounting Development. Politeknik Pos Indonesia*. Vol. 1 No. 2. ISSN: 2715-9590.
- Elmi Dwi, Endah Sulistyowati. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*. Vol. 11 No. 10. e-ISSN: 2460-0585.
- Espinoza. (2014). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*. Vol. 9 No. 2 ISSN: 2549-1261.
- Fridayana. (2013). *Analisis Regresi dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS*. Jakarta: Gramedia.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang.
- Gima Sugiama. (2013). *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Edisi Pertama. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Husaeri, Ela. (2018). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Universitas Bale Bandung. Vol. 9. No. 1. ISSN: 2086-4159.
- Husein, Umar. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Ihyaul Ulum. (2009). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit PT Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Bastian. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Made. (2006). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muhammad, Syam Khusufi. (2013). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Edisi kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Nadira Hilmi, Efrizal Syofyan. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Universitas Negeri Padang. Vol. 4 No. 4. e-ISSN: 2656-3649.
- Nana, Jouzar, Hastuti. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*. Politeknik Negeri Bandung. Vol. 1 No. 3. ISSN: 2747-1241.

- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang – Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Presiden RI: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Presiden RI: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Presiden RI: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Presiden RI: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Presiden RI: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Presiden RI: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden RI: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden RI: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden RI: Jakarta.
- Peraturan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Presiden RI: Jakarta.
- Peraturan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden RI: Jakarta.
- Peraturan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Presiden RI: Jakarta.

- Peraturan Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Presiden RI: Jakarta.
- Peraturan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susuna Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Presiden RI: Jakarta.
- Peraturan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya. Presiden RI: Jakarta.
- Santoso, S. (2009). Statistik Multivariate. Jakarta: Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Singarimbun, M & Effendi, S. (2011). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3S.
- Sugiyono. (2004). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2012). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2015). Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sulistoni. (2003). Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan. Nusa Tenggara Barat: SOMASI.
- Zachari Abdallah. (2018). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah: Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh. Jurnal Ekonomi Sakti. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci. Vol. 7 No. 1. ISSN: 2310-8380.